

## ABSTRAK

Dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara menimbulkan kontroversi diantaranya yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan juga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian hukum normatif memiliki makna yang sama dengan penelitian doctrinal yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder . dan juga dapat menganalisis hubungan antar peraturan dan menjelaskan apa yang menjadi hambatan. Hasil dari penelitian ini menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan juga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

**Kata Kunci :** Jaminan sosial, Pegawai Negeri Sipil

## ***ABSTRAC***

*The establishment of Government Regulation Number 70 Year 2015 Regarding Workplace Accident Insurance and Death Guarantee for State Civil Apparatuses caused controversy as opposed to Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, Law Number 24 of 2011 concerning BPJS and also Presidential Regulation Number 109 of 2013 Concerning Participation in Social Security Programs. The method used in this research is normative legal research because normative legal research has the same meaning as doctrinal research that is research that uses legal materials that discuss primary and secondary materials. and can also analyze the relationship between regulations and explain what the obstacles are. The results of this study are based on the Supreme Court Decree Number 32 P / HUM / 2016 and the Constitutional Court Decision Number 98 / PUU-XV / 2017 in accordance with Government Regulation Number 70 Year 2015 Regarding Workers Transfer and Death Guarantee for Civil Apparatus Act Number 40 of 2004 concerning SJSN, Law Number 24 of 2011 concerning BPJS and also Presidential Regulation Number 109 of 2013 concerning Social Security Participation Participation Program.*

***Keywords :*** Social security, Civil Servants